**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**FACTORS AFFECTING AUDIT DELAY IN REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS**

**Desty Indriani Lestari**

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Raya Wates - Jogjakarta, Karanglo, Argomulyo, Kec. Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55752, Hp: 085601190705, E-mail: [destyindriyani61@gmail.com](mailto:destyindriyani61@gmail.com)

**ABSTRAK**

Laporan keuangan yang disajikan tidak tepat waktu dapat menyebabkan laporan tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi keputusan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Ketepatan waktu laporan keuangan berperan penting dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD adalah 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 31 ayat 1). Untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, Pemerintah Daerah dan auditor diharapkan dapat meminimalkan audit delay. Audit delay merujuk pada perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan (Subekti dan Widiyanti, 2004). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay pada pemerintah kabupaten/kota. Faktor-faktor tersebut yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jumlah temuan audit, dan opini audit yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jumlah temuan audit dan opini audit tidak signifikan mempengaruhi audit delay laporan keuangan.

Kata Kunci : *audit delay*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , jumlah temuan audit, dan opini audit.

**ABSTRACT**

*Financial statements that were not provided on time may cause those report loses their capacity to influence decisions. Local governments are obliged to ensure that their financial statements are presented in a timely manner as they are a form of accountability to the public. These financial reports can be used by the public to evaluate the capabilities of local governments in managing their resources effectively and efficiently. Timeliness of financial statements plays an important role in the framework of government decision making. Based on Law No. 17 of 2003 on State Finances, the submission time of local government financial statements to Regional House of Representatives is 6 (six) months after the fiscal year ends (Article 31 paragraph 1). To meet the timeliness of financial statements, Local Government and auditors are expected to minimize the audit delay. The delay audit refers to the time difference between the date of the financial statements and the date of audit opinion in the financial statements (Subekti and Widiyanti, 2004). The purpose of this study is to analyze the factors that may affect audit delay at the district / city government. These factors are the size of local government, the experience of local governments in applying the Government Accounting Standards, the number of audit findings, and the audit opinion provided by the Indonesian Supreme Audit Institution on local government financial reports. The study population was all local government districts/cities in Indonesia. Analysis of data used multiple regression. The test results show that the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), the number of audit findings and audit opinions do not significantly affect the audit delay of financial statements.*

*Keywords: audit delay, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), audit findings, and audit opinion.*

**PENDAHULUAN**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas kinerja keuangan terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem pelaporan yang baik. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua kelompok pengguna, antara lain: (a) masyarakat; (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan (d) pemerintah. Agar dapat memenuhi kebutuhan kelompok pengguna Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik kualitatif seperti yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu: relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Agar sebuah laporan keuangan relevan, informasi yang dihasilkan harus memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, lengkap, dan tepat waktu.

Tujuan umum laporan keuangan menurut SAP adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang secara tegas memberikan batasan waktu penyampaian laporan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3): Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Ditegaskan dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa diwajibkannya laporan keuangan pemerintah daerah untuk dapat memberikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan agar diperiksa selambat-lambatnya 2 bulan setelah penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sejak berakhirnya tahun anggaran agar laporan hasil pemeriksaan diterbitkan sesuai dengan batasan waktu yang ada.

Dimana *Audit Delay* adalah rentang waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan laporan keuangan. Semakin lama rentang *Audit Delay*, semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun pada penerapan ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat ketepatwaktuan pelaporan. (Margaretta dan Soepriyanto, 2012). Sedangkan menurut Aryati (2005) menyebutkan *audit delay* sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Carslaw dan Kaplan, Payne dan Jensen (2002) menyebutkan *audit delay* sebagai waktu antara akhir tahun buku pemerintah daerah dengan penyelesaian laporan audit keuangan. *Audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut (Carslaw & Kaplan, 1991). Kapan dimulainya audit keuangan oleh BPK tergantung pada kapan laporan keuangan diserahkan oleh pemerintah daerah terkait kepada BPK. Sehingga semakin lama pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK, maka *audit Delay* semakin panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila di hubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur, terdapat faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit salah satunya ukuran pemerintahan. Ukuran pemerintahan dapat dilihat dari total asset ataupun total pendapatan. Hal ini dapat dihubungkan dengan jumlah APBD, karena semakin besar APBD maka dapat di asumsikan bahwa semakin besar pula pemerintah tersebut. Ukuran pemerintah yang besar akan menyebabkan *audit delay* yang lebih lama. Pemerintah Daerah yang memiliki APBD besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki APBD lebih kecil. Dengan transaksi keuangan yang lebih banyak, diperlukan waktu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya akan menyebabkan *audit delay*.

Temuan audit merupakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas standar dan atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum ditetapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, temuan audit akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk memperoleh tanggapan/klarifikasi atas temuan tersebut. Jumlah temuan audit yang banyak akan menambah waktu pemerintah daerah dalam memberikan tanggapan sehingga penyelesaian laporan audit menjadi lebih lama dan audit delay akan bertambah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan capaian tertinggi dalam penerapan standar akuntansi dan pengelolaan keuangan. Mendapatkan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cita-cita kepala daerah di seluruh Indonesia. Mendapatkan opini WTP adalah sebuah prestasi bagi seorang kepala daerah. Opini WTP merupakan kabar gembira bagi pemerintah daerah sehingga selayaknya untuk disampaikan sesegera mungkin kepada masyarakat. Opini audit selain opini WTP dapat diartikan sebagai kabar buruk bagi pemerintah daerah dan tidak selayaknya untuk dismapaikan sesegera mungkin sehingga LHP BPK menjadi terlambat. Sehingga dapat diartikan opini audit selain opini WTP akan menambah audit delay.

Menurut penelitian Baldric Siregar. Jurnal (2015). menguji pengaruh karakteristik pemerintah yang terdiri dari ukuran pemerintah, nilai APBD dan leverage terhadap *audit delay* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pertama, ukuran pemerintah yang berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Kedua leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit delay* melalui penelitian ini.ketiga, Ukuran pemerintah berpengaruh terhadap *audit delay.*

Dalam jurnal Penelitian Zaenal Wafa, Nugraeni. Jurnal (2018). Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pengalaman pemerintah menerapkan SAP berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah temuan audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Ukuran pemerintah daerah, Pengalaman pemerintah menerapkan SAP, Jumlah temuan audit dan Opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia

**RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempengaruhi *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah jumlah temuan audit mempengaruhi *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah opini audit mempengaruhi *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah?

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Entitas pelaporan sendiri merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

**Audit Delay**

Menurut Lawrence dan Briyan (1988) dalam Yulianti (2011:25) keterlambatan audit adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. keterlambatan audit atau dalam beberapa penelitian disebut sebagai audit reporting lag didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.

*Audit delay* adalah Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun pada penerapan ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya suatu penelitian melihat ketepatwaktuan pelaporan. (Margaretta dan Soepriyanto, 2012).

Audit delay menurut Halim (2000) didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit.

Menurut Aryati (2005) menyebutkan *audit delay* sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan penelitian sebelumnya Siregar (JRAK, Volume 11, No 2 Agustus 2015 ) yaitu nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dihubungkan dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena semakin besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka dapat di asumsikan bahwa semakin besar pula pemerintah tersebut. Ukuran pemerintah yang besar akan menyebabkan *audit delay*. Hal itu terkait dengan meningkatnya jumlah transaksi keuangan pada kota tersebut. Apabila di kaitkan dengan ukuran pemerintah, maka pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar akan menyebabkan *audit delay* semakin lama. Pemerintah Daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih kecil. Dengan transaksi keuangan yang lebih banyak, diperlukan waktu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya akan menyebabkan *audit delay*.

**Jumlah temuan audit**

Menurut Cohen dan Levantis (2012), keberadaan temuan dalam laporan audit merupakan persyaratan dalam regulasi audit. Temuan muncul dalam opini audit akibat terdapat penyimpangan terhadap SAP dan penyimpangan lain terhadap kepatuhan atas peraturan perundangan-undangan. Menurut Cohen dan Leventis (2013), ketika permasalahan akuntansi timbul, negosiasi antara auditan dengan auditor menjadi lebih intens dan berlangsung lama. Hasil penelitian Cohen dan Leventis (2013) menyebutkan banyaknya temuan audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi temuan baik di internal BPK antara tim audit lapangan dengan penanggungjawab audit maupun diskusi temuan dengan pemerintah daerah selaku auditan sebelum temuan tersebut layak untuk diangkat dalam laporan hasil audit. Selain itu menurut Beattie, Fearnley dan Brandt (2000) hal tersebut akibat negosiasi menjadi lebih intensif dan lebih lama ketika masalah akuntansi ditemukan.

**Opini audit**

Seorang auditor bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan memberikan opini informasi nila kewajaran terhadap laporan keuangan. Hasil opini akan diaudit kembali oleh BPK hasil audit BPK adalah opini atas laporan keuangan daerah. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah ada empat jenis yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Payne dan Jensen (2000) dalam Muladi (2014) menjelaskan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay.* Menurut McLelland dan Giroux (2000) opini WTP (*unqualified opinion*) merupakan sebuah kabar bagus yang harus dilaporkan sesegera mungkin. Selain itu, Payne dna Jensen (2002) menyebutkan opini WDP mengindikasikan adanya tambahan prosedur yang dibutuhkan selama pelaksanaan audit yang akan meningkatkan *audit delay*. Daerah yang telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan memiliki sistem penyusunan laporan keuangan yang baik sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan akan lebih singkat. Semakin singkat daerah dalam menyusun laporan keuangannya maka akan semakin memperpendek *audit delay* yang terjadi. Semakin cepat laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk diperiksa maka akan semakin pendek pula *audit delay* yang terjadi.

**METODE**

**Pengumpulan Data Dan Pengambilan Sampel**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa dokumen. Ringkasan sumber data masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

|  |  |
| --- | --- |
| Variabel penelitian | Sumber data |
| Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | Laporan keuangan pemerintah daerah dalam IHPS BPK RI |
| Jumlah temuan audit | IHPS BPK RI |
| Opini audit | IHPS BPK RI |

Suber: data yang diolah.

Penentuan Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pengambilan sampel dengan metode *purposiv sampling* dengan kriteria Sebagai berikut ini:

* 1. Bukan daerah pemekaran.
  2. Pencatatan akuntansi menggunakan basis akrual.
  3. Menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap sesuai dengan variabel yang telah ditentukan pada tahun 2016-2018.
  4. Menyajiakan tanggal hasil opini audit dari BPK.
  5. Meyatakan adanya temuan audit dari BPK.

Dari 547 kabupaten/kota yang diaudit oleh BPK, yang memenuhi kriteria sehingga bisa diolah selanjutnya adalah 156 kabupaten/kota.

**DEFINISI OPERASIONAL**

Variabel yang digunakan disini adalah *audit delay* dimana *audit delay* adalah lamanya penyelesaian audit yang diukur dari tanggal akhir tahun anggaran hingga tanggal diterbitkannya laporan audit oleh auditor. Pengukurannya dilakukan secara kuanatitatif dari tanggal berakhirnya tahun buku pemerintah daerah (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan audit oleh BPK.

Audit Delay : Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan dengan ukuran kuantitatif yaitu dari total banyaknya pendapatan yang dimiliki oleh pemerintahan tersebut logaritma tersebut disebut dengan 10. siregar (JRAK, Volume 11, No.2 Agustus 2015).

Jumlah temuan audit (Temuan), diukur secara kuantitatif yaitu dari jumlah temuan audit yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semester atas Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran oleh BPK RI. Wafa, Nugraeni (JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMBY Yogyakarta Volume 4 No. 1, Mei 2018).

Opini Audit (Opini), berupa jenis opini yang diberikan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang tercantum dalam IHPS BPK RI. Apabila opini BPK RI adalah WTP (wajar tanpa pengecualian) diberi kode (0), sedangkan apabila opini WDP (wajar dengan pengecualian) diberi kode (1), opini TW (tidak wajar) diberi kode (2) dan opini TMP (tanpa memberikan pendapat) diberi kode (3). Wafa, Nugraeni (JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMBY Yogyakarta Volume 4 No. 1, Mei 2018)

**METODE ANALISIS DATA**

**Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif menunjukan nilai maksimum, minimum, mean dan standar deviasi dari setiap variable independen dan variable dependen yang dijabarkan dalam bentuk statistic (Ghozali, 2013). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu audit delay, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jumlah temuan audit dan opini audit.

**Uji asumsi klasik**

**Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2016;154) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.

**Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2016;103) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas adalah pengujian yang mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan *nilai variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/*tolerance*) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat *grafik sccatterplot* atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016;134).

Pengujian heteroskedasitas menggunakan *uji Glejser* adalah dengan melihat hasil signifikansi variabel dependen (nilai absolute residual) dan variabel independen. Jika nilai signifikansi variabel independen di atas alpha (α) 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitas. Namun jika nilai signifikansi variabel independe di bawah 0,05 maka terjadi heteroskedasitas. Pengujian heteroskedasitas menggunakan *scatterplot* adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( Y prediksi – Y sesungguhnya). Jika pada *scatterplot* titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola maka tidak terjadi adanya heteroskedasitas

**Model Regresi Berganda**

Dalam Penelitian Ini Teknik Analisis Data Yang Digunakan adalah model regresi linier berganda, yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model dalam penelitian ini adalah :

Audit Delay = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e

Keterangan:

Audit Delay = Audit Delay

b0 = konstanta

b1, b2, b3, = koefisien regresi

X1 = APBD

X2 = Temuan Audit

X3 = Opini Audit

**Uji signifikansi**

**Uji persial (uji t)**

Uji parsial atau uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual atau parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai alpha (α) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 5% (0,05). Apabila dari setiap variabel diketahui bahwa signifikansi t dari hasil pengujian < 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika dari setiap variabel diketahui bahwa signifikansi t dari hasil pengujian > 0,05 maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Hasil dan pembahasan**

**Uji Statistik Deskriptif**

Hasil statistik deskriptif pada table 4.2 menunjukan bahwa jumlah observasi dalam penelitian (N) adalah 156. Variabel dependen *audit delay* (Audit Delay) memiliki nila rata-rata 130,3077 hari. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 23,607 dari 156 sempel yang diteliti. Hal tersebut menunjukan bahwa rata-rata *audit delay* pada LKPD melebihi jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu 60 hari (dua bulan). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 8, dan nilai rata-rata 6,65. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,555 dari 156 sempel yang diteliti. Menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki tiap daerah kabupaten/kota cukup besar. Jumlah temuan audit mempunyai nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 27, Dan nilai rata-rata sebesar 10,31. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 5,496 dari 156 sempel yang diteliti. Menunjukan bahwa temuan tiap daerah kabupaten/kota c ukup banyak. Opini audit mempunyai nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 3, dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,17. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,427 dari 156 sempel yang diteliti. Menunjukan bahwa opini audit sebelumnya pada umumnya terdiri dari wajar tanpa pengecualian dan tanpa memberikan pendapat.

**Tabel 4.2**

**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description Statistics** | | | | | |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Audit Delay | 156 | 67 | 180 | 130,31 | 23,607 |
| APBD | 156 | 6 | 8 | 6,65 | 0,555 |
| Temuan | 156 | 1 | 27 | 10,31 | 5,496 |
| Opini | 156 | 0 | 3 | 0,17 | 0,427 |
| Valid N (Listwise) | 156 |  |  |  |  |

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 23

**Uji asumsi klasik**

**Uji normalitas**

**Table 4.3**

**Hasil uji normalitas data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | |
|  | | Unstandardized Residual |
| N | | 156 |
| Normal Parametersa,b | Mean | ,0000000 |
| Std. Deviation | 23,45153321 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,066 |
| Positive | ,066 |
| Negative | -,055 |
| Test Statistic | | ,066 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,091c |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 23

Dari hasil uji normalitas pada table 4.3 diketahui bahwa data penelitian telah terdistribusi normal dibuktikan dengan nilai *asymp. Sig.* sebesar 0.091 bernilai lebih besar dari tingkat signifikan penelitian sebesar 0,05. Oleh karena itu data penelitian dapat digunakan untuk pegujian dengan model regresi berganda.

**Uji multikolinearitas**

**Table 4.4**

**Hasil uji multikolonearitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | |
| Model | | Collinearity Statistics | |
| Tolerance | VIF |
| 1 | APBD | ,980 | 1,021 |
| Temuan | ,935 | 1,070 |
| Opini | ,941 | 1,062 |
| a. Dependent Variable: Audit Delay | | | |

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 23

Berdasarkan table 4.4 diketahui bahwa hasil pengujian menunjukan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance value* di atas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10, dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

**Uji heteroskedastisitas**

**Table 4.5**

**Hasil uji heteroskedastisitas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 103,486 | 23,001 |  | 4,499 | ,000 |
| APBD | 3,724 | 3,461 | ,088 | 1,076 | ,284 |
| Temuan | ,239 | ,358 | ,056 | ,667 | ,506 |
| Opini | -2,417 | 4,586 | -,044 | -,527 | ,599 |
| a. Dependent Variable: Residual | | | | | | |

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 23

Berdasarkan table 4.5, hasil uji heteroskedatisitas menunjukan nilai probabilitas (sig) dalam tiap model yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

**Uji Regresi Linier Berganda**

Dapat ditunjukan hasil rangkuman analisis regresi linear berganda seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**

**Analisis regresi linier berganda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | T | Sig. |
| B |
| 1 | (Constant) | 103,486 | 4,499 | ,000 |
| APBD | 3,724 | 1,076 | ,284 |
| Temuan | ,239 | ,667 | ,506 |
| Opini | -2,417 | -,527 | ,599 |
| a. Dependent Variable: Audit Delay | | | | |

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 23.

Pada penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linier berganda yaitu, sebagai berikut:

**AUDIT DELAY =103,486+3,724X1+0,239X2-2,417X3+ e**

Hasil persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 103,486. Hal ini menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jumlah temuan audit, Opini audit memiliki nilai nol (konstan), maka angka sebesar 103,486 tidak berarti.
2. Koefisien regresi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 3,724. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan sebesar 1% maka akan berdampak pada peningkatan *audit delay* sebesar 3,724. Sebaliknya setiap terjadi penurunan sebesar 1% maka berdampak pada penurunan *audit delay* 3,724.
3. Koefisien regresi jumlah temuan audit sebesar 0,239. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan sebesar 1% maka akan berdampak pada peningkatan *audit delay* sebesar 0,239. Sebaliknya setiap terjadi penurunan sebesar 1% maka berdampak pada penurunan *audit delay* 0,239.
4. Koefisien regresi opini audit sebesar -2,417.Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan sebesar 1% maka akan berdampak pada peningkatan audit delay sebesar -2,417. Sebaliknya setiap terjadi penurunan sebesar 1% maka berdampak pada penurunan audit delay -2,417.

**Hasil pengujian hipotesis**

Pengujian dengan menggunakan uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual (parsial) yakni dengan melihat pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Table 4.7**

**Hasil Uji Hipotesis**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | T | Sig. |
| B |
| 1 | (Constant) | 103,486 | 4,499 | ,000 |
| APBD | 3,724 | 1,076 | ,284 |
| Temuan | ,239 | ,667 | ,506 |
| Opini | -2,417 | -,527 | ,599 |
| a. Dependent Variable: Audit Delay | | | | |

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS 23

Penjelasan untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut:

A. Pengujian Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Hasil pengujian uji t untuk variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperoleh nilai sebesar 0,284. Dimana nilai 0,284 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berpengaruh *negatif* terhadap *audit delay*.

B. Pengujian Terhadap Jumlah Temuan Audit

Hasil pengujian uji t untuk variabel jumlah temuan audit diperoleh nilai sebesar 0,506 . dimana nilai 0,506 lebih sebesar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal tersebut berarti jumlah temuan audit tidak terhadap *audit delay*. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan jumlah temuan audit tidak berpengaruh *negative*  terhadap *audit delay*.

1. Pengujian Terhadap Opini Audit

Hasil pengujian uji t untuk variabel opini audit diperoleh nilai sebesar 0,599. Diman nilai 0,599 lebih sebesar dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hal tersebut berarti temuan audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan opini audit tidak berpengaruh *negatif* terhadap *audit delay*.

**PEMBAHASAN**

Pada bagian pembahasan ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah diolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jumlah temuan audit dan opini audit terhadap *audit delay* dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

1. **Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap *Audit Delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah.**

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel 4.6 diketahui bahwa variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memperoleh nilai sebesar 0,284 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah, maka **H1 ditolak.**

Dengan demikian menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dihubungkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena semakin besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka dapat di asumsikan bahwa semakin besar pula pemerintah tersebut. Ukuran pemerintah yang besar akan menyebabkan *audit delay*. Hal itu terkait dengan meningkatnya jumlah transaksi keuangan pada kota tersebut. Apabila di kaitkan dengan ukuran pemerintah, maka pe merintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar akan menyebabkan *audit delay* semakin lama. Pemerintah Daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kecil memiliki transaksi keuangan lebih sedikit dan nilainya lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar. Dengan transaksi keuangan yang sedikit, tidak diperlukan waktu yang lama dalam penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya akan memperkecil pengaruh terhadap *audit delay*. Payne dan Jensen (2002).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Siregar (2015) yang membuktikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

1. **Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap *Audit Delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah.**

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.6 diketahui bahwa variabel jumlah temuan au dit memperoleh nilai sebesar 0,506 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah, maka **H2 ditolak**.

Temuan audit berupa penyimpangan terhadap SAP dan penyimpangan lain terhadap kepatuhan atas peraturan perundangan-undangan dalam menyebabkan terjadinya *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin kecil jumlah temuan audit akan semakin cepat proses audit yang dibutuhkan, sehingga *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah semakin kecil. Cohen dan Leventis (2013)

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Muladi (2014), Fachrurozi (2014), dan Wafa, Nugraeni (2018) yang membuktikan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh terhadap *audit delay*.

1. **Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit Delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah.**

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam tabel 4.6 diketahui bahwa variabel opini audit memperoleh nilai sebesar 0,599 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah, maka **H3 ditolak**.

Hal ini terjadi karena daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukan bahwa tidak banyak salah saji yang ditemukan oleh auditor, hal ini menunjukan bahwa daerah tersebut telah menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan dengan baik mencerminkan bahwa daerah tersebut telah memiliki tata kelola keuangan yang baik. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan akan lebih singkat. Semakin singkat daerah dalam menyusun laporan keuangan maka akan memperpendek *audit delay*. McLelland dan Giroux (2000).

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafa, Nugraeni (2018) yang membuktikan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay.*

**PENUTUP**

Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD), Jumlah temuan audit dan Opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerah.Penelitian selanjutnya dapat menambah faktor-faktor lain selain Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD), jumlah temuan audit dan opini audit yang diduga mempengaruhi lamanya *audit delay* pada laporan keuangan pemerintah daerahSeperti, ukuran pemerintah daerah, pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Tingkat ketergantungan, Terpilihnya kembali kepala daerah periode sebelumnya, tipe pemerintah daerah, pengaruh kemandirian keuangan daerah.Penelitian selanjutnya dapat menambah tahun penelitian agar hasil yang diperoleh mendapatkan hasil yang sangat akurat dan signifikan dalam penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aryati, Titik dan Maria Theresia, 2005,” Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay dan Timeliness,” *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* 5(3): 271-287.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016*. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018*. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2018. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. Jakarta.

Baldric Siregar.2015.”*Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* “ dalam *jurnal* JRAK. Vol 11 no 2. Yogyakarta.

Dimas Hendrawan Mursito Putro. 2017.” Pengaruh akuntansibilitas kinerja, tipe pemerintah daerah, temuan audit, dan opini audit terhadap audit delay pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *jurnal akuntansi dan auditing*. Vol 12.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan SPSS*, Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate demgan Program SPSS* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Johnson, L. E. 1998. Further Evidence On The Determinants of Local Government Audit Delay. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management,* 10 (3): 375-397.

Kasmir. 2014:28. *Anlisis laporan keuangan*. Jakarta: PT.rajagrofindo persada.

Leventis. S., dan Weetman, P, 2004, “Timeliness of Financial Reporting., Applicability of Disclosure heory in an Emerging Capital Market, *Accounting and Business Research*, Vol. 34, No. 1

Muladi, Aris. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia. *Skripsi.* Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Musawir.2010.*Analisis Laporan Keuanagan.* Edisi Keempat. Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta:Liberty.

Payne, J. L, dan K. L. Jensen. 2002. “An examination of municipal audit delay”. *Journal of Accounting and Public Policy*, 21:1-29

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Penyusunan Laporan Keuangan.* <http://www.slideshare.net/mobile/perencanakota/peraturan-peraturan-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintah.> (diakses 25 september 2019).

Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

PP No.15 tahun 2004: *pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara*.

PP No. 71 tahun 2010 *: Standar Akuntansi Pemerintah berbasi akrual.*

Puji Kurnia Putri. 2016. “analisis faktor-faktro yang mempengaruhi ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah provinsi seluruh indonesia”. *skripsi* semarang: fakultas ekonimi.

Sella Rachmawati. 2015. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.

Sella Rachmawati, Rini, Yessi Fitri. 2016.” Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. dalam *jurnal ilmu akuntansi*. Vol 9 hal 1

Zaenal Wafa, Nugraeni. 2018. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal* JRAMB. Yogyakarta: Universitas Mercubuana Yogyakarta.